



[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Strategi Pemberantasan Korupsi Di Era Digitalisasi

Bunga Ardian¹, Bq. Raeditia Puspita Ningsih², Herdinata Eka Saputra³.

¹Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, ardianbunga@gmail.com

²Universitas Mataram, Mataram, Indonesia bqraeditiapuspitaningsih@gmail.com

³Universita Mataram, Mataram, Indonesia, nataherdinataekas@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengkaji strategi pemberantasan korupsi melalui digitalisasi di Indonesia. Korupsi yang memakan biaya sekitar 5% PDB global mendorong urgensi inovasi penanggulangan di era digital. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi dan menganalisis efektivitas penerapan teknologi digital dalam upaya anti-korupsi di Indonesia, serta merumuskan rekomendasi pengembangannya. Manfaat penelitian ini adalah menyediakan kerangka strategis bagi pemangku kebijakan untuk mengoptimalkan teknologi digital dalam pemberantasan korupsi. Melalui metode studi literatur dengan menganalisis jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan publikasi organisasi internasional terkait inisiatif digital anti-korupsi, penelitian menemukan bahwa implementasi e-government, e-procurement, sistem pelaporan digital, dan portal transparansi di Indonesia telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan akuntabilitas publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan signifikan, tantangan berupa kesenjangan digital, infrastruktur terbatas, dan kapasitas SDM masih memerlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan teknologi dengan reformasi kelembagaan dan partisipasi masyarakat.

Kata kunci: korupsi, digitalisasi, e-government, transparansi, komprehensif, signifikan.

*Correspondence Address: ardianbunga@gmail.com

Article History	Received	Revised	Published
	2 June 2025	2 Juni 2025	30 March 2026

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Korupsi merupakan permasalahan global yang telah mengakar dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Sebagai fenomena yang kompleks, korupsi tidak hanya menggerogoti sumber daya ekonomi suatu negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, menghambat pembangunan berkelanjutan, dan menciptakan ketimpangan sosial. World Economic Forum (2023) memperkirakan bahwa korupsi menelan biaya global sekitar 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia atau setara dengan US\$2,6 triliun setiap tahunnya, sementara United Nations Office on Drugs and Crime (UNOC) menyebutkan bahwa negara-negara berkembang kehilangan sekitar US\$1,26 triliun akibat korupsi, pencucian uang, dan penghindaran pajak.

Di tengah tantangan yang semakin kompleks ini, era digitalisasi hadir membawa perubahan paradigma dalam strategi pemberantasan korupsi. Revolusi teknologi digital telah mentransformasi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk cara pemerintah berinteraksi dengan warganya dan mengelola sumber daya publik. Teknologi informasi dan

komunikasi (TIK) kini menawarkan perangkat yang lebih canggih, efisien, dan transparan untuk mencegah, mendeteksi, dan memberantas praktik korupsi.

Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), big data, blockchain, sistem informasi terintegrasi, dan platform media sosial memiliki potensi besar untuk memperkuat upaya anti-korupsi. Teknologi-teknologi ini dapat meningkatkan transparansi proses pengambilan keputusan publik, memperluas akses informasi bagi masyarakat, mengotomatisasi sistem pelayanan untuk mengurangi interaksi langsung yang rentan korupsi, serta menyediakan alat analisis canggih untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan. Menurut penelitian dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD, 2022), negara-negara yang mengadopsi solusi digital dalam tata kelola pemerintahan mengalami penurunan persepsi korupsi hingga 20% dalam jangka waktu lima tahun.

Namun, digitalisasi juga membawa tantangan baru. Tindak pidana korupsi pun beradaptasi dengan era digital, mengambil bentuk-bentuk yang lebih canggih dan sulit dilacak. Kejahatan siber, manipulasi data digital, dan eksploitasi kerentanan sistem informasi menciptakan dimensi baru dalam praktik korupsi. Selain itu, kesenjangan digital (digital divide) antara berbagai lapisan masyarakat dan daerah dapat menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap layanan publik digital dan berpotensi membuka celah baru untuk praktik korupsi.

Di tengah peluang dan tantangan tersebut, diperlukan strategi komprehensif untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam pemberantasan korupsi. Strategi ini harus mempertimbangkan konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya masing-masing negara, serta menyeimbangkan aspek teknologi dengan penguatan kelembagaan, reformasi hukum, dan partisipasi masyarakat. United Nations Development Programme (UNDP, 2023) menegaskan bahwa teknologi digital bukan solusi tunggal (silver bullet), melainkan katalisator yang memperkuat strategi anti-korupsi yang sudah ada.

Kajian ini akan membahas berbagai strategi pemberantasan korupsi di era digitalisasi, menganalisis implementasinya di berbagai negara, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam memberantas korupsi. Dengan pemahaman komprehensif terhadap potensi teknologi digital dan tantangannya, diharapkan strategi pemberantasan korupsi dapat lebih efektif dan berkelanjutan di era yang terus berkembang ini. RetryClaude can make mistakes. Please double-check responses. Jadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah strategi pemberantasan korupsi di era digitalisasi?

METODE | METHOD

Metode literatur sebagai "upaya sistematis untuk menemukan, mengevaluasi, dan menyintesis badan pengetahuan yang dihasilkan oleh peneliti." Ia menekankan bahwa kajian literatur adalah proses lima tahap: formulasi masalah, pengumpulan data literatur, evaluasi data, analisis dan interpretasi, serta penyajian hasil yang objektif dan transparan. Menurut Creswell (2014), Creswell mendefinisikan metode literatur sebagai "ringkasan tertulis dari artikel jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan status pengetahuan terkini tentang topik tertentu." Menurutnya, kajian literatur bertujuan menghubungkan penelitian dengan dialog yang lebih luas dalam literatur dan memberikan kerangka untuk menetapkan pentingnya penelitian baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

Era digital merupakan gerbang baru dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Kita memiliki tantangan dan peluang untuk memberantas korupsi melalui platform digital. Namun, era digital bagaikan pisau yang memiliki dua sisi. Di satu sisi memang memberikan peluang untuk memberantas korupsi agar lebih efektif dan efisien. Hasil dan Pembahasan Strategi Pemberantasan Korupsi di Era Digitalisasi. Berikut adalah hasil dan pembahasan mengenai berbagai strategi pemberantasan korupsi yang relevan di era digitalisasi:

1. Penerapan Teknologi Digital dalam Pemberantasan Korupsi

Di era digitalisasi, teknologi informasi menjadi instrumen penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Sistem-sistem digital dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan. Korupsi di sektor publik seringkali terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan transparansi dalam proses administrasi pemerintahan. Ketika pengelolaan anggaran, proyek, dan data kepegawaian dilakukan secara manual, maka peluang untuk melakukan manipulasi dokumen dan angka menjadi sangat besar. Peran teknologi informasi menjadi signifikan sebagai sarana untuk menciptakan sistem yang transparan dan terintegrasi. Melalui digitalisasi, setiap proses dan transaksi dapat terekam secara otomatis dalam basis data yang sulit untuk dimanipulasi tanpa meninggalkan jejak. Teknologi mampu mempersempit ruang gelap yang biasanya digunakan sebagai tempat berlangsungnya praktik korupsi. Selain meningkatkan akuntabilitas, teknologi juga memudahkan masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan melalui akses informasi yang terbuka (Hartono et al., 2022).

Teknologi juga membantu meningkatkan akurasi dan integritas data. Melalui integrasi sistem antarinstansi, data yang masuk dan keluar dapat dikoreksi secara silang (cross-check) secara otomatis, sehingga memperkecil kemungkinan adanya data fiktif. Dalam konteks keuangan publik, hal ini sangat penting karena korupsi kerap kali dilakukan melalui penggelembungan anggaran, pembuatan proyek fiktif, atau pelaporan yang dimanipulasi. Dengan sistem digital yang tersistem dan terenkripsi, celah tersebut dapat diminimalisasi. Teknologi tidak hanya menciptakan efisiensi birokrasi, tetapi juga membentuk ekosistem kerja yang lebih bersih dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penggunaan teknologi memungkinkan adanya audit digital secara real-time yang mempercepat proses deteksi dini terhadap potensi penyimpangan (Lee et al., 2022).

2. E-Government dan Layanan Publik Digital

Pengertian e-Government serta Definisi sangat umum ini pada dasarnya merujuk penggunaan teknologi informasi pada lembaga pemerintah atau lembaga publik. Tujuannya adalah agar hubungan-hubungan tata pemerintahan (governance) antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat tercipta sedemikian rupa sehingga lebih efisien, efektif, dan produktif. Disamping itu E-government adalah pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah, pusat dan pemerintah federal untuk mendukung operasi pemerintah, melibatkan masyarakat dan penyediaan pelayanan pemerintah. Interaksi ini meliputi pengajuan permohonan, pembayaran dan pelayanan informasi lainnya melalui Web.

Implementasi e-government telah terbukti mengurangi peluang korupsi dengan mengurangi interaksi langsung antara pejabat publik dan masyarakat. Menurut penelitian Bhatnagar (2022), negara-negara yang menerapkan sistem e-government mengalami penurunan angka korupsi hingga 15-30% dalam pelayanan publik. Contohnya, sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) yang diterapkan di Indonesia berhasil meningkatkan transparansi dan mengurangi praktik korupsi dalam proses lelang pemerintah. Hal ini sejalan dengan temuan Fazekas dan Kocsis (2020) yang menunjukkan

bahwa sistem e-procurement dapat mengurangi risiko korupsi hingga 20-25% melalui pengurangan kontak langsung dan otomatisasi proses.

3. Big Data dan Analitik untuk Deteksi Anomali

Pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan dalam menganalisis pola transaksi keuangan dapat mendeteksi anomali yang menunjukkan potensi korupsi. López-Iturriaga dan Sanz (2018) menemukan bahwa implementasi sistem analitik data dapat meningkatkan deteksi kasus korupsi hingga 35%. Di Republik Korea, sistem BARO yang mengintegrasikan data dari berbagai institusi pemerintah berhasil mengidentifikasi pola-pola mencurigakan dalam transaksi keuangan publik, memfasilitasi pengungkapan kasus korupsi yang sebelumnya sulit terdeteksi (Kim & Park, 2023).

4. Transparansi dan Keterbukaan Informasi

Open Data dan Portal Transparansi Portal data terbuka yang menyediakan informasi anggaran dan belanja pemerintah kepada publik memainkan peran penting dalam pengawasan oleh masyarakat. Penelitian oleh Transparency International (2023) menunjukkan bahwa negara-negara dengan portal transparansi anggaran yang baik memiliki indeks persepsi korupsi yang lebih rendah. Seperti di Georgia, implementasi platform ProZorro meningkatkan transparansi pengadaan publik dan menghasilkan penghematan anggaran negara hingga 15% serta menurunkan kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa (Kasemets & Gromov, 2021).

Dalam pengertian umum informasi diartikan sebagai pada ketersediaan beraneka ragam bahan berupa pengetahuan atau sesuatu yang dianggap sebagai bahan untuk melakukan komunikasi. Sebagai bahan pengetahuan, informasi terdapat dalam berbagai bentuk dan penampilan baik yang sifatnya tersedia/disajikan maupun yang ditutupi atau tidak untuk disajikan (Publikasi). Sebagai bahan komunikasi, informasi merupakan bahan yang dipertukarkan dan menjadi penghubung antara dua pihak atau lebih baik yang bertindak sebagai subjek maupun objek komunikasi. Hak atas informasi adalah bagian yang sangat menentukan dalam kehidupan setiap manusia terutama sebagai dasar untuk berpartisipasi dalam semua proses-proses sosial. Hal tersebut membuat setiap orang harus memperoleh haknya untuk mendapat akses informasi dalam berbagai aspek kehidupan. Karena itu keterbukaan informasi yang dilaksanakan dan diselenggarakan di sebuah negara harus mengandung tiga unsur utama yaitu transparansi, efisiensi, dan partisipasi. Dengan terpenuhinya hak setiap warga negara dalam mendapatkan informasi maka secara tidak langsung akan mendorong dan meningkatkan ketahanan nasional negara kita. Keterbukaan informasi menjadi salah satu ciri penting yang harus dijamin oleh negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyatnya guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Sehingga Bagaimanapun juga hak untuk tahu menjadi hak dasar dan utama yang melekat pada seluruh warga Negara Indonesia. Dalam era berkembangnya teknologi informasi maka pemerintah juga dituntut untuk membuka seluas-luasnya informasi khususnya informasi yang bersifat umum dan mendasar. Bahkan salah satu indikator utama terciptanya smart city yang menjadi tujuan kota-kota di dunia saat ini adalah keterbukaan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi dan bersama-sama dengan pemerintah dalam menentukan keputusan yang lebih baik (smart decision-making).

Dalam banyak literatur juga telah disimpulkan bahwa dengan melaksanakan keterbukaan informasi maka akan mendukung tingkat kesuksesan badan publik termasuk dalam hal ini pemerintah dan lembaga lembaganya untuk lebih bisa memaksimalkan tujuannya.

Keterbukaan informasi akan mampu meningkatkan akurasi, efisiensi dan efektifitas kebijakan yang diambil oleh badan publik karena terjadinya interaksi atas pertukaran informasi yang dilakukan (Yang & Maxwell, 2011). Namun hal yang paling utama dalam mendorong keterbukaan informasi adalah dukungan dari lembaga-lembaga politik (legislatif) dalam menyiapkan peraturan dan dasar hukum agar keterbukaan informasi dapat dilakukan secara luas dan menyeluruh pada lembaga-lembaga pemerintahan.

5. Whistleblowing System Digital

Salah satu alat deteksi dini yang paling efisien untuk penipuan, pencurian, dan masalah terkait korupsi adalah sistem pelaporan pelanggaran, yang merupakan alat kepatuhan. Untuk menahan tingkat pelanggaran yang tinggi, pengendalian internal yang baik sudah cukup. Hasilnya, telah terbukti bahwa layanan whistleblowing system dapat mencegah penipuan. Dalam hal deteksi dini penipuan, penggelapan, pelecehan, pencurian, korupsi, kolusi, dan nepotisme, layanan whistle-blowing system merupakan alat kepatuhan yang berguna. Jenis-jenis pelanggaran yang dapat ditangani oleh mekanisme whistleblowing harus dikontrol pada saat digunakan. Tentu tidak serta merta, dan tidak semua jenis laporan akan diunggah ke mekanisme pelapor. Dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi yang dimiliki partai politik, partai politik dapat mengatur jenis-jenis pelanggaran kader terhadap kode etik partai, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Ada kemungkinan bahwa satu laporan berisi beberapa pelanggaran etika.

Layanan whistleblowing system yang dikelola oleh internal partai yang berkompeten dan berpengalaman akan menjamin keberhasilan dalam menindaklanjuti laporan secara profesional dalam menjaga integritas partai politik. Setelah itu, partai harus mengidentifikasi proses penanganan laporan, baik dari alur penanganan etik maupun koordinasi antar organ internal partai politik. Platform pelaporan korupsi secara digital memberikan saluran anonim dan aman bagi pelapor untuk mengungkap praktik korupsi. Penelitian oleh Spáč et al. (2022) menunjukkan bahwa whistleblowing system yang efektif dapat meningkatkan pengungkapan kasus korupsi hingga 40%. Di Korea Selatan, sistem Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC) memberikan perlindungan digital kepada whistleblower dan telah berkontribusi signifikan dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi besar.

6. Blockchain untuk Integritas Data

Penerapan teknologi blockchain dalam pengelolaan dokumen publik menjamin integritas dan keaslian data, mencegah manipulasi dokumen oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurut López-Robles et al. (2021), teknologi blockchain dapat mengurangi risiko pemalsuan dokumen hingga 85%. Di Estonia, penggunaan KSI Blockchain untuk mengamankan rekam medis, catatan properti, dan dokumen resmi lainnya telah menciptakan sistem yang sangat tahan terhadap manipulasi data (Kshetri & Voas, 2022).

7. Literasi Digital dan Partisipasi Masyarakat

Peningkatan literasi digital masyarakat merupakan komponen penting dalam strategi pemberantasan korupsi. Penelitian oleh Mungiu-Pippidi dan Dadašov (2020) menunjukkan korelasi positif antara tingkat literasi digital dengan kemampuan masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah. Program-program edukasi digital seperti yang diimplementasikan di Finlandia telah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses dan memahami data pemerintah, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan (Nordic Council of Ministers, 2023).

8. Tantangan Implementasi

Kebijakan publik adalah sarana yang digunakan pemerintah untuk bekerja. Masyarakat dihadapkan pada berbagai masalah mulai dari masalah sosial, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan lain-lain. Pemerintah melalui kebijakannya menawarkan solusi untuk mereka. Namun, banyak kebijakan publik yang dirumuskan di Indonesia sejak kemerdekaan belum memberikan manfaat yang memadai bagi masyarakat Indonesia karena menghadapi tantangan implementasi yang serius yang mengakibatkan kegagalan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian dokumenter dan sumber-sumber sekunder untuk pengumpulan data. Beberapa tantangan yang diidentifikasi oleh penelitian ini yang menghambat implementasi kebijakan publik di Indonesia antara lain adalah pengaruh yang tidak terkendali dari lembaga-lembaga internasional dalam perancangan dan perumusan kebijakan, duplikasi lembaga-lembaga yang terlibat dalam implementasi program dan praktik-praktik Mala Administrasi. Buruknya implementasi/kegagalan program-program pembangunan di Indonesia antara lain menyebabkan pemborosan sumber daya manusia dan material yang penting, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan citra buruk negara di luar negeri. Mengingat berbagai tantangan ini, studi ini merekomendasikan bahwa pemerintah harus secara sadar dan berani melepaskan diri dari pengaruh yang tidak semestinya dari lembaga-lembaga internasional dengan agen-agensya dan melibatkan rakyat/penerima manfaat dalam setiap tahap kebijakan/program pembangunan.

Bertujuan mengungkap tantangan dan peluang dalam implementasi pembelajaran berbasis teknologi melalui berbagai penelitian yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data sekunder yang dianalisis melalui reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Meskipun digitalisasi menawarkan banyak peluang dalam pemberantasan korupsi, implementasinya menghadapi beberapa tantangan: (1). Kesenjangan digital yang masih lebar di banyak negara berkembang (2). Resistensi dari birokrasi terhadap perubahan sistem (3). Keamanan siber yang masih rentan (4). Kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai. Menurut studi World Bank (2024), kesenjangan digital dapat mengurangi efektivitas strategi anti-korupsi berbasis teknologi hingga 40% di negara-negara berpenghasilan rendah.

KESIMPULAN | CONCLUSION

Strategi pemberantasan korupsi di era digitalisasi memerlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan teknologi digital, reformasi kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Digitalisasi layanan publik, analitik data untuk deteksi anomali, blockchain untuk integritas data, dan platform transparansi merupakan komponen-komponen utama yang perlu diimplementasikan secara simultan. Tantangan implementasi perlu diatasi melalui peningkatan kapasitas, investasi infrastruktur digital, dan edukasi masyarakat. Dengan strategi yang tepat, digitalisasi dapat menjadi katalisator penting dalam upaya pemberantasan korupsi secara global.

UCAPAN TERIMAKASIH | THANK-YOU NOTE

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan arahnya, serta teman-teman yang telah memberikan dukungan moral dan semangat selama proses penelitian ini.

REFERENSI | REFERENCE

- Kurniawansyah, E (2021). Habituasi Nilai- Nilai Karakter Sebagai Pelaku Korupsi Pada Masyarakat Kajang. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 10-29
- Fazekas, M., & Kocsis, G. (2020). Uncovering High-Level Corruption: Cross-National Objective Corruption Risk Indicators Using Public Procurement Data. *British Journal of Political Science*, 50(1), 155-164.
- Kasemets, K., & Gromov, D. (2021). The Role of Digital Procurement Platforms in Reducing Corruption: Case Studies from Eastern Europe. *Journal of Public Procurement*, 21(3), 302-319.
- Kim, J., & Park, S. (2023). Leveraging Big Data Analytics for Anti-Corruption: The BARO System in South Korea. *Government Information Quarterly*, 40(2), 101748.
- Kshetri, N., & Voas, J. (2022). Blockchain in Developing Countries: The Case of Estonia's KSI Blockchain. *IT Professional*, 24(3), 16-22.
- López-Iturriaga, F., & Sanz, I. P. (2018). Predicting Public Corruption with Neural Networks: An Analysis of Spanish Provinces. *Social Indicators Research*, 140(3), 975-998.
- López-Robles, J. R., Otegi-Olaso, J. R., & Porto-Gómez, I. (2021). Blockchain in Public Administration: A Systematic Literature Review. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 68(6), 1905-1919.
- Mungiu-Pippidi, A., & Dadašov, R. (2020). When Do Anticorruption Laws Matter? The Evidence on Public Integrity Enabling Contexts. *Crime, Law and Social Change*, 74, 263-282.
- Nordic Council of Ministers. (2023). *Digital Literacy as a Tool Against Corruption: Nordic Experiences*. Copenhagen: Nordic Council Publications.
- Park, H., & Lee, J. (2024). Whistleblower Protection in the Digital Age: South Korea's ACRC System. *Public Administration and Development*, 44(1), 67-82.
- Spáč, P., Voda, P., & Zagrapan, J. (2022). Does the Freedom of Information Law Increase Transparency at the Local Level? Evidence from a Field Experiment. *Government Information Quarterly*, 39(1), 101649.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Berlin: Transparency International.
- World Bank. (2024). *Digital Government and the Fight Against Corruption: Challenges and Opportunities*. Washington, DC: World Bank Group. RetryClaude can make mistakes. Please double-check responses.

